Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 449 - 458	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

INKLUSI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Aldi Ahmad Rifai¹, Sahadi Humaedi²

^{1, 2}Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

(aldi17003@mail.unpad.ac.id¹, sahadi.humaedi@unpad.ac.id)

ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang paling terdampak dalam situasi pandemi COVID-19. Situasi krisis telah memperparah ketimpangan, diskriminasi, dan kekerasan bagi penyandang disabilitas. Pembatasan sosial sebagai protokol pencegahan COVID-19 berdampak pada terbatasnya penyandang disabilitas dalam mengakses layanan Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai hukum internasional dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai tujuan global menjadi dua agenda politik yang perlu diadopsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melibatkan penyandang disabilitas dalam merespon situasi krisis seperti pandemic COVID-19. Inklusifitas dan kemudahan akses menjadi kunci perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam situasi pandemi dalam memastikan penyandang disabilitas tidak tertinggal (*no one left behind*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pandemi sebagai situasi krisis dirasakan bagi penyandang disabilitas sebagai kelompok paling rentan. Melalui Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai hukum internasional dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda global perlu diadaptasi dan diperhatikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk dapat melibatkan penyandang disabilitas dalam melindungi hak-hak mereka dan mempermudah akses kebutuhan dasar dalam menjamin pemberdayaan selama pandemi COVID-19 agar penyandang disabilitas sebagai kelompok yang secara inklusif menjadi sasaran target SDGs tetap berdaya dan ketimpangan maupun diskriminasi dapat dihilangkan.

Kata Kunci: *Penyandang Disabilitas, Sustainable Development Goals, Inklusi*

ABSTRACT

Persons with disabilities are the most vulnerable groups affected by the COVID-19 pandemic situation. The crisis situation has exacerbated inequality, discrimination and violence for persons with disabilities. Social restrictions as a protocol for preventing COVID-19 have an impact on the limited access for persons with disabilities to access health services, education, work and social protection. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities as international law and Sustainable Development Goals (SDGs) as global goals are two political agendas that need to be adopted by the government as policy makers and other stakeholders in involving persons with disabilities in responding to crisis situations such as the COVID-19 pandemic. Inclusiveness and easy access are keys to protecting the rights of persons with disabilities in carrying out daily activities in a pandemic situation in ensuring that persons with disabilities are not left behind (no one left behind). The results showed that the impact of a pandemic as a crisis situation was felt for persons with disabilities as the most vulnerable group. Through the Convention on the Rights of Persons with Disabilities as international law and Sustainable Development Goals (SDGs) as a global agenda, it needs to be adopted and considered by governments and stakeholders to be able to involve persons with disabilities in protecting their rights and facilitate access to basic needs in ensuring empowerment during a pandemic. COVID-19 so that people with disabilities as a group that is inclusively targeted by the SDGs remain empowered and inequality and discrimination can be eliminated.

Keywords: Persons with Disabilities, Sustainable Development Goals, Inclusion

PENDAHULUAN

Coronavirus (COVID-19) telah dinyatakan sebagai pandemi global dan telah menyebar ke banyak negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. COVID-19 dengan

mudah menyebar dengan cepat melalui kontak langsung dengan *droplet* (tetesan pernapasan) dari orang yang telah terinfeksi. Hingga awal Juni 2020, COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 6 juta orang di seluruh dunia. Di Indonesia

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 449 - 458	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

sendiri, COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 30 ribu orang di seluruh provinsi. Sehingga dalam menekan penyebaran virus, *World Health Organization* (WHO) dan negara yang terinfeksi telah menerapkan protokol pencegahan COVID-19.

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan protokol pencegahan COVID-19 di Indonesia yang diterapkan di beberapa wilayah yang memiliki kasus positif COVID-19 terbanyak. Diberlakukannya PSBB memiliki dampak kepada seluruh lapisan masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. (Kumparan, 2020). Hal tersebut karena dibatasinya aktivitas masyarakat di luar rumah dan penutupan fasilitas publik seperti diliburkannya sekolah dan tempat kerja, penutupan tempat ibadah dan objek wisata, termasuk pembatasan transportasi publik. Dampak tersebut pun dirasakan oleh kelompok rentan. Penyandang disabilitas dengan beragam disabilitasnya merupakan salah satu kelompok rentan yang paling terdampak pandemi COVID-19. (Kemsos, 2020)

Terdapat lebih dari 1 miliar penyandang disabilitas di dunia dengan sekitar 82 persen diantaranya yang berada di negara-negara berkembang, hidup di bawah garis kemiskinan, mengalami tingkat kekerasan yang tinggi dan termasuk kelompok yang paling termajinkan dalam situasi krisis. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 37 juta penyandang disabilitas. 17 juta diantaranya merupakan anak dan lansia. Dalam situasi normal, Penyandang disabilitas sering dihadapkan dengan keterbatasan dalam memenuhi hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kelompok bahkan menghadapi marginalisasi yang tinggi, contohnya seperti penyandang disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas ganda yang sering diabaikan dalam berbagai layanan dan sering mengalami tindak kekerasan. Penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan dalam mengakses Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, dan dalam berpartisipasi di masyarakat. Pandemi COVID-19 telah memperparah situasi tersebut dengan memberikan dampak baik secara

langsung maupun tidak langsung kepada penyandang disabilitas. (United Nations, 2020b)

Penyandang disabilitas memiliki risiko tinggi untuk terpapar COVID-19. Keterbatasan dan kesulitan dalam melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 menjadi faktor utama bagi penyandang disabilitas menjadi kelompok paling rentan dalam situasi pandemi. Keragaman disabilitas memberikan kesulitan yang beragam tergantung pada gangguan (*impairments*) yang dimiliki. Hambatan yang dapat dihadapi oleh penyandang disabilitas yaitu keterbatasan dalam menerapkan perlindungan dasar seperti mencuci tangan, menggunakan masker, melakukan jaga jarak (*physical distancing*), terbatasnya akses air, sanitasi, fasilitas cuci tangan; ketergantungan pada pendamping yang dapat melakukan kontak fisik; terbatasnya akses dalam mengakses informasi kesehatan masyarakat; tempat kerja yang tidak menyediakan fasilitas inklusif, maupun terbatasnya akses Pendidikan maupun pekerjaan secara daring. Hambatan tersebut diperparah bagi mereka yang tinggal di pemukiman informal dan/atau dipengaruhi oleh keadaan darurat kemanusiaan. (United Nations, 2020b)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Bersama merupakan agenda global 2030 yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi manusia dan planet di masa kini dan di masa mendatang. Dengan Kerjasama global, SDGs bertujuan mengakhiri kemiskinan, meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan, mengurangi ketimpangan, dan memicu pertumbuhan ekonomi yang dirumuskan melalui 17 target. Berbeda dengan tujuan global sebelumnya, *Millenium Development Goals* (MDGs), SDGs dirumuskan secara inklusif bagi seluruh masyarakat di dunia termasuk kelompok rentan dan termajinkan termasuk disabilitas. Setiap negara di dunia yang merumuskan SDGs harus memastikan tidak ada siapapun yang tertinggal (*no one left behind*) dalam agenda pembangunan. SDGs menjadi momentum dalam perwujudan hak bagi penyandang disabilitas yang tertera dalam

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 449 - 458	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (KHPD) untuk memberdayakan mereka dan mendukung penghormatan HAM secara universal, setara dan non-diskriminasi. (United Nations, 2020c). Secara khusus Disabilitas masuk kedalam 5 target utama SDGs yang berhubungan dengan KHPD yaitu Tujuan 4 (Pendidikan), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), Tujuan 11 (Kota yang Berkelanjutan), Tujuan 17 (Kemitraan Global). (United Nations, 2020a)

Dalam situasi krisis seperti ini, penyandang disabilitas perlu mendapatkan perlindungan sebagai salah satu kelompok yang secara inklusif masuk dalam agenda SDGs. Seperti yang tertera dalam KHPD pasal 11 menyebutkan bahwa setiap negara yang

PEMBAHASAN

Disabilitas dalam *Sustainable Development Goals*

Disabilitas didefinisikan sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Disabilitas adalah orang yang hidup dengan keterbatasan dan karakteristik khusus baik secara fisik maupun mental. Keterbatasan tersebut membutuhkan pelayanan khusus dalam memenuhi hak-haknya sebagai manusia yang setara dengan orang pada umumnya.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (KHPD) sebagai salah satu hukum internasional yang memuat hak-hak penyandang disabilitas bertujuan untuk melindungi, memajukan, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap marabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyetujui KHPD berkomitmen dalam mewujudkan tujuan hak penyandang disabilitas tersebut. Hal tersebut salah satunya diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016

menyetujui konvensi tersebut termasuk Indonesia harus mengambil “sebuah tindakan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi yang berisiko, termasuk konflik bersenjata, keadaan darurat kemanusiaan, dan bencana alam.” Sehingga perlindungan secara inklusif harus diberikan kepada penyandang disabilitas terutama dalam situasi pandemi yang sedang berlangsung. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan membahas mengenai dampak dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas, dalam situasi pandemi COVID-19 dan rekomendasi dalam mewujudkan inklusifitas penyandang disabilitas dalam situasi pandemi COVID-19 berdasarkan perspektif SDGs.

tentang Disabilitas, pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk “mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.”.

KHPD mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam kerangka kerja hukum untuk mengadvokasi perwujudan hak-hak tersebut melalui 33 pasal yang mencakup seluruh bidang kehidupan dan harus diimplementasikan dan dipantau. *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda pembangunan global menjadi momentum politik untuk mendorong terealisasinya KHPD. Agenda SDGs dirumuskan berdasarkan komitmen internasional dan nasional seperti yang telah tercantum dalam KHPD. SDGs dapat digunakan sebagai platform advokasi untuk menarik perhatian pembuat keputusan dan kebijakan dan program inklusif bagi disabilitas. Agenda SDGs berkomitmen untuk memberdayakan kelompok yang berisiko rentan termasuk penyandang disabilitas dalam mendukung hak asasi manusia dan kesetaraan dalam hidup.

SDGs secara inklusif telah meningkatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan memasukan penyandang disabilitas dalam agenda global. Agenda pembangunan sebelumnya, *Millenium*

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 449 - 458	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

Development Goals (MDGs) mengabaikan kepentingan hak penyandang disabilitas. SDGs sebagai agenda pembangunan yang melanjutkan MDGs memberikan kesempatan untuk meningkatkan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dimana tidak ada siapapun yang tertinggal “*no one left behind*”. (Ikmal Hisham Md. Tah, 2018). Hal tersebut tertuang dalam Rumusan SDGs Pasal 23:

“Agenda SDGs berfokus pada pentingnya pengentasan kemiskinan dan inklusifitas setiap orang di dalam masyarakat di mana dikenal dengan istilah tidak ada yang tertinggal. Agenda tersebut mengacu pada pemberdayaan kelompok rentan yang kebutuhannya tercermin dalam tujuan yaitu kelompok yang termasuk anak-anak, pemuda, orang dengan disabilitas (di mana lebih dari 80% hidup dalam kemiskinan), orang dengan HIV/AIDS, lansia,

masyarakat adat, pengungsi dan migran. SDGs bertekan untuk mengambil Langkah dan Tindakan yang efektif sesuai dengan hukum internasional untuk menghilangkan rintangan dan hambatan, memperkuat dukungan dan memenuhi kebutuhan khusus orang yang tinggal di daerah yang terdampak darurat kemanusiaan dan di daerah yang terdampak terorisme.” (UN, 2015, pasal 23).

Disabilitas secara inklusif disebutkan dalam agenda SDGs pada 5 target agenda global yaitu, Tujuan 4 (Pendidikan), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), Tujuan 11 (Kota yang Berkelanjutan), Tujuan 17 (Kemitraan Global). Target tersebut tertuang dalam table yang dirumuskan oleh PBB, sebagai berikut (United Nations, 2020a):

Tujuan SDGs	Indikator Target
Tujuan 4 (Memastikan inklusifitas dan Pendidikan berkualitas bagi semua dan mendukung kesempatan belajar sepanjang hidup untuk semua)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghilangkan disparitas gender dalam Pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat Pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi masyarakat rentan termasuk penyandang disabilitas, 2. Membangun dan meningkatkan fasilitas Pendidikan yang ramah anak, penyandang disabilitas dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua.
Tujuan 8 (Mendukung keberlanjutan, inklusifitas, dan pertumbuhan ekonomi, penuh dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki, pemuda, dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama.
Tujuan 10 (Mengurangi ketimpangan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari jenis kelamin, usia, ras, suku, asal, agama, disabilitas atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
Tujuan 11 (Membuat kota dan pemukiman menjadi inklusif, aman, resilien dan berkelanjutan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua. Meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia. 2. Menyediakan ruang publik yang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia.
Tujuan 17 (Memperkuat makna dari implementasi dan revitalisasi kemitraan global dalam pembangunan berkelanjutan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya,

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 449 - 458	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

	yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umum, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis, dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
--	--

Disabilitas Dalam Situasi Pandemi COVID-19

Sebagai salah satu kelompok rentan yang paling terdampak pandemi COVID-19, penyandang disabilitas berada dalam risiko tinggi terpapar virus dan semakin mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-harinya termasuk mengikuti protokol pencegahan COVID-19. Dalam laporan berjudul “ Shared Responsibility, Global Solidarity” menyebutkan bahwa COVID-19 bukan hanya krisis Kesehatan melainkan berdampak pada sosio-ekonomi masyarakat. Hal tersebut memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi pada penyandang disabilitas yang mengancam dan memperburuk kondisi mereka. PBB memaparkan beberapa dampak COVID-19 kepada penyandang disabilitas (United Nations, 2020b), sebagai berikut:

1. Dampak pada Pendidikan

UNESCO mengatakan setidaknya 1,37 miliar siswa di dunia telah dirumahkan dalam mersepon pembatasan aktivitas di luar rumah akibat pandemic COVID-19 (UNESCO, 2020). Sistem Pendidikan pun diubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring (*online*). Multimedia dan internet dibutuhkan dalam mengakses pembelajaran secara daring. Siswa dengan disabilitas mendapatkan hambatan dalam mengikuti sistem baru ini, dari terbatasnya akses teknologi dan internet disebabkan mayoritas penyandang disabilitas masih hidup dalam kemiskinan (Universitas Airlangga, 2020). Selain itu teknologi pembelajaran perlu disesuaikan dengan ragam disabilitas, misalnya pada disabilitas netra membutuhkan computer yang teraktivasi aksesibilitas melalui perintah suara. Kurangnya dukungan, pendampingan dan akses pembelajaran secara daring memperparah kesenjangan

bagi siswa penyandang disabilitas. Keterbatasan selama pembelajaran daring menghambat kemampuan siswa dalam memasuki dunia kerja.

2. Dampak pada pekerjaan dan perlindungan sosial

Penyandang disabilitas telah dihadapkan eksklusi dalam pekerjaan. Dalam situasi COVID-19 dengan pembatasan aktivitas ekonomi termasuk pekerjaan mempengaruhi penyandang disabilitas dalam bekerja. Di Indonesia sendiri sebagian besar penyandang disabilitas bekerja dalam sektor informal (Susilawati, 2016). Di mana dengan pembatasan aktivitas di luar rumah, memaksa mereka tidak bekerja dan kehilangan penghasilan. Penyandang disabilitas memiliki kemungkinan lebih tinggi dalam kehilangan pekerjaannya dan mengalami kesulitan yang tinggi untuk Kembali bekerja selama masa pemulihan pandemi.

3. Dampak pada ketimpangan

COVID-19 telah memperparah ketimpangan bagi penyandang disabilitas. Salah satunya dalam protokol pencegahan COVID-19, penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam mengakses komunikasi dan informasi terkait COVID-19. Komunikasi pun menjadi terhambat bagi beberapa ragam disabilitas contohnya disabilitas rungu, melalui penggunaan masker dan pembatasan jarak menjadi hambatan bagi mereka dalam melaksanakan komunikasi sehingga menjadi lebih terisolasi dan berisiko terabaikan. Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kendala ekonomi. Kurangnya dukungan finansial memperparah tingkat kemiskinan pada penyandang disabilitas. Terbatasnya aktivitas di luar rumah berdampak pada terhambatnya penyandang disabilitas

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 449 - 458	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

dalam memenuhi kebutuhannya termasuk obat-obatan dan layanan khusus yang dibutuhkan secara rutin.

4. Dampak pada keterbatasan akses
Protoko 1 pencegahan COVID-19 akan berbeda pengimplementasiannya bagi penyandang disabilitas dengan ragam disabilitasnya. Keterbatasan akses pada layanan Kesehatan, layanan sosial, pemukiman yang aman, dan fasilitas publik menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 yang menjadikan mereka berada dalam risiko tinggi terpapar COVID-19.

Inklusi Penyandang Disabilitas dalam COVID-19

Pendekatan berbasis hak penyandang disabilitas dibutuhkan dalam memastikan penyandang disabilitas tidak tertinggal dalam situasi krisis apapun. KHPD dan AGenda SDGs perlu menempatkan penyandang disabilitas sebagai pusat perhatian dalam agen perencanaan dan implementasi. Inklusifitas dibutuhkan dalam menanggapi situasi krisis seperti pandemi dalam memperhatikan kelompok rentan pada setiap kebijakan perlindungan yang dibuat. Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang sama dengan semua orang dalam perlindungan sosial, kebutuhan dasar, tempat tinggal, dan pendapatan. Cara terbaik dalam memberlakukan inklusi penyandang disabilitas yaitu dengan mengikutsertakan mereka dalam perencanaan dan usaha. KHPD dan SDGs membutuhkan peran pemerintah dan pemangku kepentingan di setiap negara khususnya di Indonesia dalam menjamin perlindungan hak hidup penyandang disabilitas dalam situasi krisis untuk tetap bertahan hidup dan berdaya.

PBB menyatakan beberapa pendekatan dasar dalam melaksanakan inklusifitas bagi penyandang disabilitas dalam pandemi COVID-19, sebagai berikut:

1. Aksesibilitas
Memastikan aksesibilitas terhadap fasilitas, layanan, dan informasi menjadi

fundamental dalam melaksanakan inklusifitas bagi penyandang disabilitas dalam COVID-19. Jika informasi Kesehatan masyarakat, bangunan, transportasi, komunikasi, teknologi, barang dan jasa tidak dapat diakses, maka penyandang disabilitas tidak dapat mengambil keputusan yang diperlukan, hidup secara mandiri dan mengisolasi atau karantina secara aman, atau mengakses layanan Kesehatan masyarakat secara setara dengan orang lain.

2. Partisipasi
Penyandang disabilitas memiliki hak untuk dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam setiap keputusan yang menyangkut hidupnya. Dilibatkannya representatif dari penyandang disabilitas dari perencanaan, implementasi hingga monitoring menjadi penting dalam merumuskan kebijakan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Kemitraan dan kolaborasi akan meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas dalam membantu tercapainya inklusi dan memastikan setiap Langkah yang diambil dalam penanganan COVID-19 menguntungkan penyandang disabilitas dan berkontribusi dalam pembangunan jangka Panjang dan pemulihan keadaan.
3. Akuntabilitas
Akuntabilitas menjadi penting dalam memastikan tanggapan dan penanganan terhadap COVID-19 secara inklusif dan menghormati hak penyandang disabilitas.
4. Disagregasi data
Memastikan pengumpulan dan ketersediaan disagregasi data menjadi penting dalam upaya memahami bagaimana penyandang disabilitas menghadapi dampak COVID-19, dan untuk memonitor inklusifitas mereka dalam setiap tahapan dalam menanggapi dan menangani COVID-19. Data penyandang disabilitas dalam menghadapi COVID-19 dapat dikumpulkan menggunakan metode internasional seperti *Washington Group tools*.

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 449 - 458	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

Rekomendasi Inklusi Disabilitas Dalam COVID-19

PBB merkomendasikan beberapa Tindakan kebijakan dalam melindungi penyandang disabilitas di situasi pandemic COVID-19 dan dampak dari *lockdown*, *physical distancing*, dan isolasi, dan untuk mencapai tanggapan dan penanganan COVID-19 yang inklusif pada penyandang disabilitas (United Nations, 2020b). Beberapa rekomendasi tersebut yaitu:

1. Kesehatan

Pembatasan sosial membatasi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan Kesehatan. Disrupsi dalam layanan Kesehatan merugikan penyandang disabilitas yang membutuhkan akses Kesehatan dikarenakan kondisi Kesehatan yang dialami. Sehingga perlu adanya solusi yang membantu penyandang disabilitas dalam mengakses layanan Kesehatan bahkan dalam situasi krisis apapun. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan inklusi bagi penyandang disabilitas dalam layanan Kesehatan di situasi COVID-19 yaitu dengan:

- a. Memastikan mudahnya akses informasi Kesehatan masyarakat bagi penyandang disabilitas untuk tetap *up to date* dan mengimbangi perubahan yang cepat selama pandemic berlangsung. Salah satunya dengan menyediakan akses informasi dalam beragam Bahasa termasuk Bahasa isyarat;
- b. Mengimplementasikan perlindungan pencegahan COVID-19 dengan menyediakan fasilitas mencuci tangan dan perlindungan kesehatan yang tepat baik di rumah maupun fasilitas publik dan Lembaga. Salah satunya dengan menyediakan masker yang tetap dapat mempermudah penyandang disabilitas membaca Bahasa isyarat;
- c. Memastikan akses terhadap layanan seperti transportasi ke fasilitas Kesehatan, informasi dalam bahasa isyarat maupun audio. Selain itu memastikan juga layanan Kesehatan

dapat diakses secara jarak jauh yang disesuaikan dengan ragam disabilitasnya. Seperti mengadakan tes COVID-19 bagi penyandang disabilitas di rumah;

- d. Memastikan tidak ada diskriminasi dalam alokasi sumber daya medis yang langka;
 - e. Intervensi Kesehatan mental yang inklusif bagi penyandang disabilitas menjadi penting sebagaimana situasi krisis ini dapat memicu stress dan kecemasan bagi setiap orang akibat pembatasan aktivitas di luar rumah dan peningkatan kasus positif COVID-19. Dukungan layanan psikososial harus dapat diakses dan tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas
- ### 2. Perlindungan Penyandang Disabilitas Dalam Setting Lembaga.
- Penyandang disabilitas yang berada dalam setting Lembaga seperti Lembaga pelayan masyarakat meningkatkan risiko untuk terpaap COVID-19. Situasi tersebut diperparah dengan risiko mendapatkan tindak pelecehan, pengekangan, isolasi dan kekerasan. Berikut beberapa rekomendasi dalam melindungi penyandang disabilitas dalam setting Lembaga:
- a. Menyiapkan Lembaga dalam mencegah dan menanggapi potensi infeksi COVID-19 salah satunya dengan memprioritaskan test COVID-19 dan memperhitungkan pencegahan dalam Lembaga untuk mengurangi risiko infeksi, mengurangi kerumumunan, isolasi dan jaga jarak, menyesuaikan jam jenguk, memastikan peralatan pelindung, dan meningkatkan kondisi higienitas.
 - b. Mengurangi jumlah orang dalam Lembaga melalui pembebasan bersyarat termasuk bagi penyandang disabilitas jika memungkinkan. Strategi desentralisasi perlu dipercepat dan diperkuat dengan *timeline* yang jelas dan tolak ukur yang nyata.
- ### 3. Layanan Pendukung

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 449 - 458	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

Beberapa penyandang disabilitas membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya dan dalam berpartisipasi di masyarakat. Hal ini termasuk dalam pendampingan pribadi, Bahasa isyarat dan interpretasi, dukungan sebaya dan layanan bantuan di rumah (*in-home services*), dan lainnya. Dalam memastikan layanan tersebut dapat berlangsung bagi penyandang disabilitas, terdapat beberapa rekomendasi inklusi disabilitas dalam COVID-19 yaitu:

- a. Memastikan keberlanjutan layanan pendukung bagi penyandang disabilitas dengan membuat panduan praktis dan saran terbaru untuk pendamping informal baik di rumah maupun di Lembaga dalam mendukung penyandang disabilitas dengan cara yang aman.
- b. Memperluas dukungan komunitas bagi penyandang disabilitas. Dukungan yang luas bagi penyandang disabilitas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka termasuk layanan Kesehatan dan perlindungan sosial dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari

4. Pekerjaan dan Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial telah terbukti menjadi elemen kunci dalam memberikan bantuan cepat kepada orang-orang yang terkena dampak sosial ekonomi di situasi krisis. Perlindungan sosial dibutuhkan bagi penyandang disabilitas yang telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka dari terhentingnya aktivitas ekonomi informal. Beberapa rekomendasi dalam perlindungan sosial yaitu:

- a. Memperluas perlindungan sosial kepada penyandang disabilitas dan memberikan bantuan yang memadai bagi mereka dan keluarga. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui meningkatkan tunjangan penyandang disabilitas; memperluas cakupan tunjangan penyandang disabilitas yang belum terdaftar melalui pendaftaran daring, memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas dalam skema

bantuan sosial, termasuk bagi anggota keluarga yang berhenti bekerja untuk mendampingi penyandang disabilitas, dan memaksimalkan pembayaran daring dan pengiriman paket tanpa keluar rumah.

- b. Pekerjaan dan kondisi kerja perlu responsive dalam aksesibilitas dan inklusi bagi mereka yang masih terpaksa bekerja dalam situasi pandemi. Perlindungan dan penyesuaian kerja yang aman selama pandemi perlu diberlakukan bagi pekerja disabilitas.
 - c. Penentuan alternative pekerjaan dirancang untuk mudah diakses dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Platform kerja perlu dapat diakses oleh setiap orang termasuk penyandang disabilitas dalam melaksanakan *work from home* (WFH).
 - d. Memastikan inklusi dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi penyandang disabilitas. K3 harus diterapkan sesuai dengan tempat kerja maupun pekerjaan yang diambil.
 - e. Pendekatan dalam mengakhiri *lockdown* perlu memperhatikan situasi tertentu bagi penyandang disabilitas. Dengan tingkat kerentanan yang berbeda, perlindungan sosial harus disesuaikan dan adaptif terhadap penyandang disabilitas.
- #### 5. Pendidikan
- Diberlakukanya sistem pembelajaran jarak jauh menjadi tantangan tersendiri bagi siswa dengan disabilitas dengan hambatan dan keterbatasan akses yang dimiliki. Beberapa rekomendasi dalam mengatasi tantangan Pendidikan dalam situasi pandemi yaitu:
- a. Memastikan pembelajaran jarak jauh dapat diakses dan inklusif bagi seluruh siswa dengan disabilitas. Tenaga pendidik perlu memastikan keberlanjutan pembelajaran bagi siswa dengan disabilitas. Peralatan khusus mungkin diperlukan bagi siswa dengan disabilitas dalam membantu pembelajaran jarak jauh dan termasuk bantuan dukungan dari pendampingnya

- b. Mengatasi dampak pembelajaran dalam situasi pandemi. Penutupan sekolah dengan penggantian sistem pembelajaran jarak jauh akan menutup akses siswa disabilitas dalam mendapatkan kebutuhan di sekolah seperti kebutuhan gizi, Kesehatan, rujukan, maupaun konsultasi. Akses-akses tersebut perlu disiasati dengan memastikan kebutuhan dasar siswa dengan disabilitas tetap terpenuhi baik melalui dukungan keluarga maupun pendamping agar pembelajaran jarak jauh tetap dapat berjalan dengan lancar.
 - c. Memastikan kembalinya aktivitas sekolah dapat tetap inklusif. Perlu adanya inklusifitas ketika pembukaan sekolah setelah pandemic berakhir dengan tetap memastikan tidak adanya *gap* dalam mengakses Pendidikan bagi siswa dengan disabilitas.
6. Pencegahan dan Tanggapan Terhadap Kekerasan
- Penyandang disabilitas sering dihadapkan dengan kekerasan dalam situasi yang terisolasi, dengan disabilitas anak dan perempuan berada dalam risiko tinggi. Pengaduan kekerasan harus secara inklusif dan responsive dalam situasi pandemi bagi penyandang disabilitas. Beberapa rekomendasi dalam memastikan kemanusiaan penyandang disabilitas, yaitu:
- a. Memastikan layanan pendampingan kekerasan yang inklusif dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas menjadi penting terutama dalam situasi pandemi, dengan memastikan konseling jarak jauh dapat diakses dan merespon bagi keragaman disabilitas.
 - b. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan melalui *building capacity* dari layanan dan komunitas untuk mencegah kekerasan bagi penyandang disabilitas secara inklusif.
7. Konteks Kemanusiaan
- Penyandang disabilitas dalam konteks kemanusiaan dan bencana dihadapkan dengan tantangan yang tinggi dalam COVID-19 seperti hambatan dalam

menerapkan higienitas, keterbatasan dalam melaksanakan jaga jarak, dan hambatan dalam mengakses layanan Kesehatan. Beberapa rekomendasi yang dapat ditempuh dalam mengatasi hambatan tersebut, yaitu:

- a. Memastikan pendampingan kemanusiaan dan respon bencana yang inklusif bagi disabilitas melalui perencanaan kebutuhan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam situasi pandemi. Seperti memastikan protokol pencegahan COVID-19 dapat dilaksanakan oleh seluruh penyandang disabilitas, akses Kesehatan, makanan, dan nutrisi dapat terjamin selama pandemi, diberikan peralatan perlindungan Kesehatan yang sesuai dengan ragam disabilitas, penyediaan kebutuhan dasar melalui bantuan sosial.

Hak-hak penyandang disabilitas dalam situasi pandemi COVID-19 harus dapat tetap terjamin. Perlindungan bagi mereka sebagai kelompok rentan perlu dilaksanakan secara inklusif dan mudah diakses secara spesifik oleh penyandang disabilitas. KHPD dan SDGs sebagai dua hukum dan agenda internasional dapat menjadi landasan dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas agar dapat bertahan selama situasi krisis seperti pandemi. Kedua agenda tersebut perlu diperhatikan bagi pembuat kebijakan dalam mengatur protokol perlindungan secara inklusif dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan dan termarginalkan seperti penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Situasi pandemic COVID-19 berdampak pada seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat termasuk sosial dan ekonomi. Dampak dari pandemi sebagai situasi krisis dirasakan bagi penyandang disabilitas sebagai kelompok paling rentan. Melalui Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai hukum internasional dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda global perlu diadapatsi dan diperhatikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 449 - 458	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

dapat melibatkan penyandang disabilitas dalam melindungi hak-hak mereka dan mempermudah akses kebutuhan dasar dalam menjamin pemberdayaan selama pandemi COVID-19 agar penyandang disabilitas sebagai kelompok yang secara inklusif menjadi sasaran target SDGs tetap berdaya dan ketimpangan maupun diskriminasi dapat dihilangkan.

Pekerja sosial memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya inklusifitas penyandang disabilitas dalam situasi COVID-19. Profesi pekerjaan sosial berperan dalam agenda global SDGs untuk memastikan tidak ada siapapun yang tertinggal sebagai upaya seluruh masyarakat dapat hidup secara sejahtera dan berfungsi secara sosial. Dalam situasi krisis pandemi, pekerja sosial dibutuhkan dalam mengupayakan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan tetap diperhatikan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikmal Hisham Md. Tah, K. A. M. (2018). Improving the Rights of Persons With Disabilities in Malaysia. *International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled.*, vol.4(June), 89–93.
- Kemsos. (2020). *Pedoman Cegah COVID-19 Untuk Disabilitas*.
<https://www.kemsos.go.id/pedoman-cegah-covid-19-untuk-disabilitas>
- Kumparan. (2020). *Dampak Virus Corona Bagi Lingkungan Sosial, Ekonomi Hingga Alam*.
<https://kumparan.com/berita-hari-ini/dampak-virus-corona-bagi-lingkungan-sosial-ekonomi-hingga-alam-1t7qNLhBsbK>
- Susilawati, D. (2016). *Sebagian Besar Penyandang Disabilitas Kerja di Sektor Informal*.
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/16/oi9rpj384-sebagian-besar-penyandang-disabilitas-kerja-di-sektor-informal>
- UNESCO. (2020). *1.37 billion students now home as COVID-19 school closures expand, ministers scale up multimedia approaches to ensure learning continuity*.
<https://en.unesco.org/news/137-billion-students-now-home-covid-19-school-closures-expand-ministers-scale-multimedia>
- United Nations. (2020a). *Disability-Inclusive Sustainable Development Goals*.
https://www.un.org/disabilities/documents/sdgs/infographic_disability_inclusive_sdgs.jpg
- United Nations. (2020b). *Policy Brief: A Disability-Inclusive Response to COVID-19*.
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/sg_policy_brief_on_persons_with_disabilities_final.pdf
- United Nations. (2020c). *Sustainable Development Goals*. Sustainable Development Goals
- Universitas Airlangga. (2020). *Kondisi Kemiskinan Disabilitas di Indonesia*.
<http://news.unair.ac.id/2020/05/04/kondisi-kemiskinan-disabilitas-di-indonesia/>